

Jokowi Minta Tol yang Konstruksinya Selesai Dibuka untuk Mudik Lebaran

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar jalan tol yang konstruksinya telah selesai supaya dibuka agar dapat dilintasi oleh masyarakat yang mudik Lebaran.

Nantinya setelah selesai dilalui para pemudik, kata Jokowi, jalan tol tersebut dapat di cek kembali untuk dipersiapkan secara lengkap.

"Tol tol yang konstruksinya sudah selesai ini menjelang lebaran akan dibuka untuk bisa dimanfaatkan dalam rangka mengurangi kemacetan. Setelah nanti lebaran baru di cek lagi. Siap untuk operasional secara lengkap," kata Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (10/3).

Jokowi juga meminta kepala daerah khususnya di pulau Jawa untuk bersiap-siap menjelang mudik lebaran Hari Raya Idul Fitri tahun 2023.

"Mudik semuanya nanti utamanya yang menjadi tujuan-tujuan mudik

Jawa Tengah di Pak Gub, di Jawa Timur Bu Gubernur, Jawa Barat pak Gubernur semuanya harus bersiap-siap menjelang mudik," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, tahun ini diperkirakan masyarakat yang mudik mencapai 123 juta. Angka tersebut mengalami kenaikan pada mudik tahun lalu. "Karena kurang lebih 123 juta masyarakat kita akan bersamasama mudik. Tahun kemarin 86 ini 123 juta hati-hati angka ini hati-hati," jelasnya.

Selain kepala daerah, Jokowi juga memperingatkan kepada Menteri Perhubungan, Kapolri hingga Menteri BUMN untuk bersiap-siap menghadapi mudik lebaran tahun ini.

"Saya sudah memperingatkan menteri perhubungan, Kapolri, Menteri BUMN yang menyangkut Transportasi laut para gubernur para bupati dan wali kota betul-betul menyiapkan diri karena melompat dari 86 juta ke 123-124 juta," katanya. ● han

Ajudan Johnny Plate Nyaris Baku Hantam dengan Wartawan

JAKATYA (IM) - Ajudan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate nyaris baku hantam saat wartawan menanyakan perihal dugaan kasus korupsi proyek BTS di BAKTI Kominfo yang menyeret nama Menkominfo.

Awalnya, wartawan menanyakan perihal revisi kedua Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang baru saja dibahas bersama Komisi IDPR. Namun, Johnny yang juga Sekjen Partai Nasdem ini memilih bungkam dan enggan menjawab pertanyaan wartawan.

"Pak, soal ITE pak.. pak soal ITE pak..," tanya wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/4).

Kemudian, saat awak media menanyakan perihal dugaan korupsi proyek BTS, Johnny menegaskan bahwa

ia hanya bicara soal ITE saja. "Saya hanya urusan ITE aja ITE, saya hanya bahas tentang ITE," jawab Johnny.

Tidak berhenti di situ, beberapa wartawan masih menanyakan perihal dugaan kasus korupsi BTS. Namun, di eskalator Gedung Nusantara II, Gedung DPR, terjadi adu fisik dimana ajudan Menkominfo mendorong seorang wartawan bernama Novian dari salah satu media daring. Sempat terjadi saling dorong dan adu sikut antara keduanya. Tak terima, Novian mengungkapkan kekesalannya dan menanyakan kenapa ia harus didorong di eskalator. "Apaan sih woy? Biasa aja dong," kata Novian.

Sang ajudan berkilah bahwa Novian yang memukul terlebih dulu. Namun, Novian menjawab bahwa sang ajudan yang mendorongnya terlebih dulu, padahal ia menghormati Menkominfo dan hendak mewawancaranya saja. ● mei

Sandiaga Pamit Keluar dari Gerindra, Prabowo Minta Dipikirkan Lagi

JAKARTA (IM) - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pesan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada Sandiaga Uno yang pamit dari Partai Gerindra.

Dasco mengatakan, Prabowo meminta Sandi untuk mempertimbangkan secara matang keputusannya itu.

"Pak Prabowo menyampaikan untuk kebaikan Sandi, apakah itu sudah dipertimbangkan matang-matang, sudah dipikirkan masak-masak," ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/4).

Prabowo menyampaikan pesan itu kepada Sandi demi kebaikan Sandi.

Setelah Sandi pamit ke Prabowo, keduanya pun belum berkomunikasi lagi. Dasco memastikan Gerindra akan membiarkan Sandi mengambil keputusannya sendiri. "Tentunya hal itu berpulang pada Pak Sandi. Karena Pak Prabowo itu sebanyak-banyaknya orang yang mau bergabung dengan Gerindra akan diterima dengan baik," tuturnya.

Sementara itu, Dasco

meminta agar pertanyaan apakah Sandi sudah resmi keluar dari Gerindra atau belum ditanyakan langsung kepada Sandi.

"Kalau itu nanti silakan ditanya saja ke Pak Sandi, langkah apa yang akan diambil setelah ini," kata Dasco.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani merespon positif soal bergabungnya Sandiaga Uno menjadi kader PPP. Ia menyatakan sinyal tersebut semakin kuat beberapa waktu belakangan.

"Insya Allah (Sandiaga bergabung PPP). Ini Insya Allah-nya serius," ujar Arsul ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4).

Ia mengungkapkan PPP telah berkomunikasi secara intensif dengan Partai Gerindra. Sejumlah kader elite Gerindra, lanjut Arsul, memberi kebebasan kepada Sandiaga untuk menentukan pilihan politiknya.

"Teman-teman Partai Gerindra itu menyampaikan pada kami di PPP, (pilihan) itu kembali kepada orangnya, karena mau berada di partai mana pun itu memang kembali pada diri kita masing-masing," katanya. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



RAKER KOMISI I DPR DENGAN MENKOMINFO

Menkominfo Johnny G Plate (tengah) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4). Raker tersebut membahas RUU tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Zakat dan THR Dijadikan Modus Politik Uang di Bulan Ramadhan

Bawaslu imbau para calon anggota legislatif untuk tidak membagikan uang di tempat ibadah baik dengan modus zakat, THR, ataupun shodaqoh.

JAKARTA (IM) - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja sebut pemberian zakat dan tunjangan hari raya (THR) kerap dijadikan modus politik uang saat bulan Ramadhan.

Pernyataan ini disampaikan Rahmat Bagja kepada para wartawan usai melaksanakan kegiatan syukuran HUT Bawaslu RI ke-15 di Kantor Bawaslu RI, Minggu (9/4) malam.

"THR kan seharusnya dibagikan pengusaha ke pekerja. THR kan tidak dibagikan ke masyarakat, itu kan bukan THR. Penggunaan istilah ya. Nanti bagaimana dengan pembagian uang pada saat lebaran, oleh politisi. Yang jelas, kami menyarankan tidak usah," ujar Bagja.

Dalam masa Ramadhan, Bawaslu sudah mengimbau kepada para calon anggota legislatif untuk tidak membagikan uang di tempat ibadah baik dengan modus zakat, THR, ataupun shodaqoh.

"Harusnya dengan adanya aspirasi adanya bagi teman-teman petahana khususnya, tapi bagi teman-teman yang baru kan seharusnya sosialisasi, kami melarang adanya aktifitas partai di tempat ibadah. Biasanya masalah THR dibagikan di masjid," jelas Bagja.

Ia menyarankan kepada para caleg agar menyalurkan sedekah ke lembaga-lembaga bantuan yang memiliki kewenangan. Ia meminta para caleg tersebut mendukung pemerintah untuk meningkatkan kemampuan Bazis.

Terkait modus-modus pemberian uang di tempat ibadah, Bagja menilai hal tersebut masuk ke dalam pelanggaran administrasi dan bukan mencuri start kampanye.

"Pelanggaran administrasi. Curi start kampanye agak sulit, kampanye itu adalah meyakinkan para pemilih yang disertai dengan visi misi program kerja dan citra diri, jika itu dilakukan full maka itu disebut curi start kampanye. Tapi kalau hanya salah satunya saja, itu sulit dikatakan kampanye," terangnya.

Fungsi pencegahan terus dilakukan Bawaslu untuk kepada teman-teman (partai politik) agar tidak melakukan politik uang.

"Kalaupun dilakukan kemudian bentuk sosialisasinya melanggar tentunya masuk pelanggaran administrasi. Itu menjadi catatan bagi kami dalam mengawasi di masa kampanye mendatang," tambah Bagja.

Hal tersebut dikatakan

Bagja menjadi catatan bahwa yang bersangkutan pernah melanggar ketentuan sosialisasi pada masa-masa sosialisasi.

"Sehingga jadi target. Karena di kampanye, bila dilakukan terus-menerus dan kita sudah berikan teguran, dan kita berikan pelanggaran administrasi, dan dilakukan maka akan menjadi catatan bagi kami," tutur Bagja.

Apabila modus politik

uang yang dilakukan oleh peserta Pemilu 2024 pada masa sosialisasi kembali terulang pada masa kampanye, maka Bawaslu kata Bagja akan menerima sanksi tegas.

"Kemudian apabila di kampanye terulang lagi (biasanya), mohon maaf yang namanya ultimatum remedium sudah kami lakukan, karena masa pencegahan nya sudah kami lakukan pada masa sosialisasi," ujarnya. ● han



RAKER KOMISI II DPR DENGAN KEMENTERIAN ATR/BPN

Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto (kedua kiri) bersama dengan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4). Raker tersebut membahas permasalahan pertanahan serta tindak lanjut atas hasil kunjungan kerja panja pengawasan.

Mangkir dan Tidak Kooperatif, KPK Cegah Dito Mahendra ke Luar Negeri

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah saksi Mahendra Dito Sampurno alias Dito Mahendra untuk bepergian ke luar negeri. Pencegahan terhadap Dito selama enam bulan atau tepatnya hingga Oktober 2023.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri menjelaskan alasan pihaknya mencegah Dito Mahendra pergi ke luar negeri. Sebab, Dito kerap tidak kooperatif saat dipanggil sebagai saksi dalam proses penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Nurhadi (NHD).

"Karena sikap saksi yang mangkir dan tidak kooperatif memenuhi panggilan patut tim penyidik KPK," kata Ali Fikri melalui pesan singkat, Senin (10/4).

"KPK telah mengajukan cegah untuk tidak melakukan perjalanan luar negeri ke Dirjen Imigrasi Kemkumham RI terhadap satu orang saksi pada proses penyidikan perkara dugaan TPPU dengan tersangka NHD," ujar Ali.

Ali mengatakan, cegah enam bulan pertama ini dapat diperpanjang jika Dito masih tidak kooperatif. Sebab, keterangan Dito sangat dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan pencucian uang tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi. "Jadi tindakan ini juga merupakan upaya untuk mempercepat proses penyelesaian

perkara. KPK mengingatkan saksi dimaksud, untuk kooperatif hadir penuh panggilan tim penyidik," tegas Ali.

"Selain itu, upaya paksa juga dapat KPK lakukan agar saksi dihadapkan pada tim penyidik untuk dilakukan pemeriksaan," imbuhnya.

Dito tercatat sudah dua kali mangkir alias tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Pertama, Dito mangkir pada Jumat, 31 Maret 2023. Kemudian, Dito dijadwalkan ulang pada hari ini. Namun, ia kembali tak hadir dan justru meminta jadwal ulang kembali.

KPK telah mengagendakan jadwal ulang pemeriksaan terhadap Dito. Dito diultimatum untuk kooperatif datang memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. KPK mengancam akan jemput paksa Dito jika kembali mangkir. Untuk diketahui, KPK berhasil menemukan 15 pucuk senjata api berbagai jenis saat mengeledah salah satu kediaman Dito Mahendra, di Jalan Erlangga V, Nomor 20 Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin, 13 Maret 2023, lalu.

Temuan senpi tersebut kemudian diserahkan proses izin serta hukumnya ke Bareskrim Polri. Sebab, KPK bukan mencari objek perkara api di rumah Dito. KPK mencari aset pencucian uang mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang ditiptipkan ke Dito. ● mei

Saut Situmorang dan Bambang Widjojanto akan Laporkan Firli Bahuri ke Dewas KPK

JAKARTA (IM) - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019, Saut Situmorang hingga mantan Wakil Ketua KPK 2011-2015, Bambang Widjojanto, akan melaporkan Ketua KPK saat ini, Firli Bahuri ke Dewan Pengawas (Dewas).

Menurut Saut, Firli melakukan banyak dugaan pelanggaran etik sejak ia bertugas di KPK. Namun, pelanggaran etik apa yang bakal dilaporkan masih dibahas oleh tim.

"Kalau dalam pikiran saya dasarnya banyak sejak dia pernah di KPK," kata Saut saat dihubungi wartawan, Senin (10/4).

Terpisah, Bambang Widjojanto (BW) juga menyatakan bakal ikut melaporkan Firli ke Dewan

Pengawas. Menurutnya, jumlah kelompok yang akan melaporkan Firli ke Dewas cukup banyak.

"Yang ikut melapor kan sesuai list laporan pengaduan jauh lebih banyak," tuturnya.

Selain itu, BW juga menyebut berbagai tokoh akan berunjuk rasa di gedung KPK. Tokoh yang ikut dalam aksi tersebut di antaranya, Saut Situmorang, mantan Ketua KPK periode 2011 Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Kemudian, eks Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana, Indonesia Memanggil (IM) 57+, Indonesia Corruption Watch (ICW), LBH Muhammadiyah, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan

lainnya.

"Saya sendiri akan terlambat hadir," ujar BW -sebutan untuk Bambang Widjojanto.

Dalam pamflet digital yang disebar, tertulis seruan bahwa KPK dikorupsi Firli Bahuri hingga pernyataan, "KPK milik rakyat, bukan milik Firli".

Diketahui, sejak dua pekan lalu Firli dilaporkan sejumlah pihak ke Dewas atas dugaan pelanggaran etik antara lain, mencopot Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro. Kemudian, memaksakan menaikkan Formula E ke tahap penyidikan hingga diduga terlibat membocorkan dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). ● mei



RAKER KOMISI II DPR DENGAN MENTERI PANRB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas (tengah) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4). Raker tersebut membahas penyelesaian tenaga honorer.

mandiri PENGUMUMAN

Telah dilakukan Pengalihan Piutang dan Atau Cessie fasilitas kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada Tanggal 10 April 2023 dengan keterangan sebagai berikut :

- 1.) Nama Debitur Neno Suparno.
- 2.) Nilai Pengalihan Piutang (Cessie) sebesar Rp.3.899.318.706,48
- 3.) Cessionaris a.n Sdr. Afif Rudin Nur Azis, beralamat di Pangenrejo RT.002/007 Desa. Pangenrejo, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo, Jawa Tengah

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tmt 10 April 2023 seluruh kewajiban hutang kredit atas nama Neno Suparno telah beralih kepada pihak ketiga sebagaimana disebutkan pada butir 3 diatas.

PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.
Regional Retail Collection & Recovery Jakarta 2